

SKRIPSI

**KINERJA PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DESA TAULO KECAMATAN ALLA
KABUPATEN ENREKANG**



Oleh :

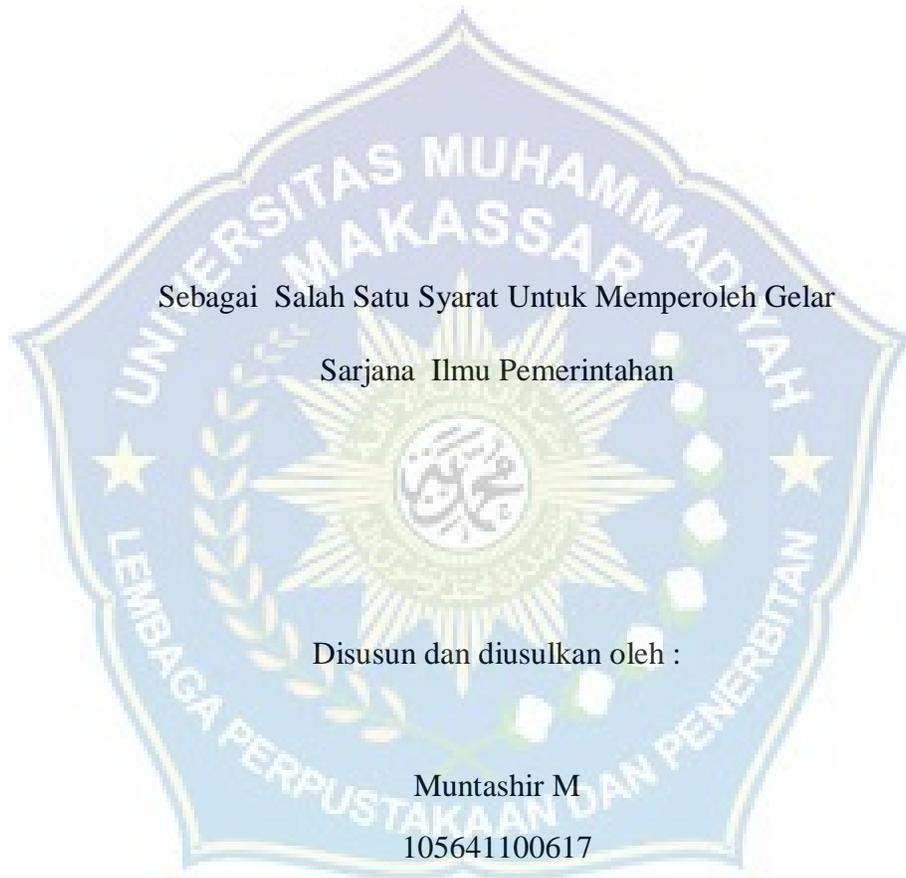
Muntashir M

105641100617

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

**KINERJA PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DESA TAULO KECAMATAN ALLA
KABUPATEN ENREKANG**



Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diusulkan oleh :

Muntashir M
105641100617

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023**

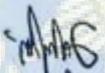
HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah Diterima Oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0005/SK-Y/65201/091004/2023 Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Dan Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan Yang Dilaksanakan Di Makassar Pada Hari Kamis, 20 Juli 2023.

Mengetahui:

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730 772

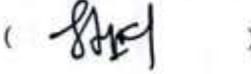

Andi Labor Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992 797

Tim Penguji:

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si (Ketua)

2. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

3. Hamrun, S.IP., M.Si

)
)
)

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kinerja Pendamping Desa Dalam
Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa
Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang

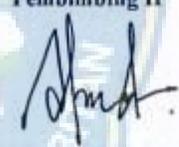
Nama Mahasiswa : Muntashir M
Nomor Induk Mahasiswa : 105641100617
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

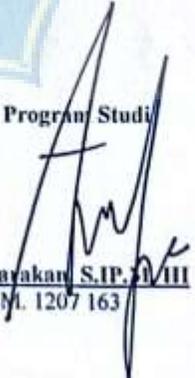

Ahmad Taufik, S.IP., M.AP

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM. 730 727


Ahmad Hayakan, S.IP., M.III
NBM. 1207 163

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muntashir M

NIM : 105641100617

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi Penelitian dengan judul “Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang” adalah sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari orang lain, tidak melakukan penciplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang di jatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketika keilmuan dalam karya ilmiah ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya ini.

Makassar, 22 Mei 2023

Muntashir M

ABSTRAK

Muntashir M. 2023. Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang (dibimbing oleh Ansyari Mone dan Ahmad Taufik)

Penelitian ini bertujuan untuk Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif .Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini wawancara,observasi, dan dokumentasi. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan .1) Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang. Produktivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Taulo berjalan sesuai dengan indikator produktifitas dapat dilihat dari proses pembangunan yang telah dilakukan secara keseluruhan. kualitas pelayanan yaitu kualitas kinerja dari pendamping desa dalam pembangunan infrastruktur kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat desa dengan mendengarkan serta melibatkan masyarakat dalam berbagai program yang dibuat oleh pemerintah desa.responsivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Taulo memberikan pelayanan dengan menanggapi keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti melalui di adakannya rapat sampai pada proses pelaksanaannya untuk mencapai responsibilitas yang tinggi ini diperlukan pekerjaan baik dan teratur sesuai dengan prinsip administrasi yang benar dan tepat dalam sebuah birokrasi pemerintahan . kuntabilitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Taulo bertanggung jawab dalam mendampingi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari beberapa pembangunan yang telah di laksanakan yang berjalan dengan baik.2) Fator penghambat dan faktor pendukung Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang Adapun faktor penghambat kinnerja pendamping Desa Taulo yaitu kualitas dan kuantitas dari pendamping desa sedangkan faktor pendukung pada kinnerja pendamping Desa Taulo yaitu partisipasi masyarakat serta sarana dan prasana di Desa Taulo.

Kata Kunci : Kinerja, Pendamping Desa ,Infrastruktur

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh Segala syukur dan nikmat atas karunia Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”** yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan doa dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda dan Ibunda senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tiada henti dan tanpa amrih. Dan saudara-saudaraku

tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing I (satu) dan Bapak Ahmad Taufik, S.IP., M.AP selaku pembimbing II (dua) yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Kepada Kepala Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang dan Aparat desa, serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan penulis selama proses penelitian berlangsung.
3. Bapak Prof. DR. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si.
5. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Ahmad Harakan, S.IP.M. HI
6. Teman-teman penulis yang tak hentinya memberi dukungan moril dan mendampingi penulis disegala kondisi.

7. Sahabat-sahabat dan semua keluarga saya yang telah memberikan dukungan moril dan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman IP 017 yang sama-sama berproses dan berjuang untuk sebuah cita-cita mulia. Yang tiada hentinya memberi dukungan kepada penulis agar menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman kelas IP A yang senantiasa memberi semangat, dukungan, masukan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 10 Juni 2023

Muntashir M

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN HASIL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Landasan Teori.....	9
1. Kinerja	9
2. Pemerintah Desa	12
3. Pendamping Desa	16
4. Pembangunan Desa	22
C. Kerangka Fikir	24
D. Fokus Penelitian.....	25
E. Deskripsi Fokus Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Lokasi dan waktu penelitian	26
A. Jenis dan Tipe Penelitian	26
B. Sumber Data	27
C. Informan Penelitian	27
D. Teknik Pengumpulan Data	28
E. Teknik Analisis Data	29
F. Teknik Pengabsahan Data	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
B. Hasil Penelitian	39
C. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Upaya yang dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pemerintah melakukan pendampingan dengan dibantu oleh pendamping profesional yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Tenaga pendamping tersebut ditempatkan di kabupaten, kecamatan dan di desa. (Maimunah, Afifuddin, & Suyeno, 2021).

Pendampingan desa bertujuan mempercepat pembangunan desa agar kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif juga perlu dibina agar kemajuan desa dapat tercapai. Adanya pendampingan desa diharapkan dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari pemerintah desa dan masyarakat. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan yang berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa.

Adanya Pendampingan desa diharapkan mampu mendongkrak perubahan dalam masyarakat desa serta bergerak cepat untuk menyusun strategi dalam menuntaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial, tentunya sasarannya adalah pembangunan fisik, sarana prasarana desa, pemberdayaan masyarakat dengan tujuan membuka seluas-luasnya terhadap pembangunan desa. Pendampingan desa memiliki kedudukan dalam pemerintahan desa dan mempunyai kewenangan dari Kementerian. Sehingga mengharuskan seorang pendamping desa untuk menjalankan peran sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pendamping Desa pada pasal 10 B yang menyebutkan bahwa tugas pendamping desa adalah mendampingi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan (Adriansah, Sartika and Ony).

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Kinerja pendampingan desa selama ini ketika mengawal dan memfasilitasi kebutuhan di Desa masih terbilang minim. Karena hal ini dipicu dengan permasalahan Desa yang begitu kompleks. Baik mulai dari aparatur, ekonomi dan SDM masyarakat

termasuk dalam infrastruktur Pendamping desa ini tidak akan mampu mengatasi hal tersebut secara langsung, butuh kerjasama seluruh pihak untuk menyelesaikan satu per satu.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat 3 huruf a yaitu pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, angka 6 tentang infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa. Infrastruktur desa seperti jalan, jembatan, saluran air dan sebagainya harus di manfaatkan dan pemeliharaan infrastruktur yang lebih baik sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Dari hasil observasi awal yang telah dilakukan, Salah satu masalah yang dihadapi dalam peningkatan ekonomi lokal adalah kurang tersedianya infrastruktur yang memadai, terutama di daerah perdesaan. Kondisi pelayanan infrastruktur perdesaan umumnya masih kurang. Maka perlu adanya pembangunan infrastruktur agar dapat mempermudah masyarakat .

program pembangunan infrastruktur yang ada di desa Taulo terdapat pembangunan jembatan dan pembangunan saluran air.

Berdasarkan latar Belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Diatas Maka Rumusan Masalah Pada Penelitian Ini Adalah

1. Bagaimana Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang
2. Apa factor penghambat dan factor pendukung Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang
2. Untuk Mengetahui Apa faktor penghambat dan faktor pendukung Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keilmuan dalam kajian Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang sejenis.
2. Kegunaan secara Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya pemerintah kabupaten Enrekang.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran-saran terhadap pemerintah kabupaten Enrekang



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian yang akan peneliti lakukan.

NO	Nama Penulis	Judul Jurnal/skripsi	Hasil penelitian
1.	(Julinda, 2019)	Peran pendamping kampung dalam pengelolaan Alokasi dana kampung (adk) di kampung Lambing kecamatan muara lawa Kabupaten kutai barat	Penelitian meruapakan menunjukkan bahwa untuk penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan pelaporan pertanggungjawaban, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Hanya saja dalam penyusunan Rincian Anggaran Biaya (RAB) memiliki kendala dalam pendampingan Aparat Kampung menyusun laporan RAB kekurangannya tenaga ahli seperti pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI) yang tidak ada di kecamatan. Sedangkan peran pendamping mendorong prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat kampung dalam mewujudkan desa mandiri.
2.	(Christina, 2017)	Kinerja pendamping lokal desa dalam peningkatan Pembangunan desa di kecamatan kalirejo Kabupaten lampung tengah	Hasil dari penelitian menunjukan, kinerja pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa belum maksimal. Pada indikator prestasi kerja (<i>achievement</i>) Pendamping Lokal Desa belum memperlihatkan hasil yang positif, karena pelaksanaan pendampingan tidak dilaksanakan dengan baik. Keahlian (<i>skill</i>) dari Pendamping Lokal Desa masih sangat rendah dan tidak memiliki pengalaman kerja. Perilaku

			<p>(<i>attitude</i>) terkait dengan pertanggungjawaban kerja dari Pendamping Lokal Desa tidak sesuai dengan pelaksanaan kerja yang sesungguhnya. Kepemimpinan (<i>Leadership</i>) terkait dengan koordinasi bidang pembangunan yang dilakukan oleh Pendamping Lokal Desa dengan kepala desa tidak dilaksanakan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kinerja, pada factor kualitas dan kemampuan masih sangat rendah. Selanjutnya sarana pendukung belum tersedia dalam pelaksanaan pendampingan desa.</p>
3.	(Susanti, 2017)	<p>Peran pendamping desa dalam mendorong prakarsa dan Partisipasi masyarakat menuju desa mandiri di desa Gonoharjo kecamatan limbangan kabupaten kendal</p>	<p>Rendahnya peranserta masyarakat dan kelembagaan desa dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa serta pelestarian hasil-hasil pembangunan menyebabkan masyarakat desa semata-mata diposisikan sebagai objek atau sasaran pembangunan. Alhasil partisipasi yang ada masih sebatas pada output atau pemanfaatan hasil. Secara umum banyak potensi alam di desa yang masih dikelola secara subsisten, sebagai dampak ketidakmampuan penguasaan teknologi, pendidikan masyarakat yang relatif rendah serta kecenderungan sifat penduduk desa yang menerima kondisi apa adanya. Di sinilah peran pendamping menjadi strategis dalam mendorong prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat desa dalam mewujudkan desa mandiri yang mampu bertindak selaku subjek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.</p>

Adapun perbedaan serta kekurangan dan kelebihan pada ketiga penelitian terdahulu di atas yaitu :

1. Grace Frederika Julinda (2019) : Pada penelitian ini mendeskripsikan tentang peran dari pendamping kampung (Desa) dalam pengelolaan alokasi dana serta factor penghambat dan factor pendukung didalamnya namun dalam penelitian ini tidak menjelaskan tentang tanggung jawab dari pendamping kampung (desa).
2. MARIA CHRISTINA (2017) : pada penelitian ini mendeskripsikan tentang kinerja pendamping local desa di Kabupaten Lampung tengah serta factor yang mempengaruhi kinerja pendamping local di Kabupaten Lampung namun dalam penelitian ini tidak menjelaskan tentang pendampingan local hanya berfokus pada penyusunan laprang kerjan
3. Martien Herna Susanti (2017) : Fokus penelitian mencakup prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, peran pendamping desa dalam mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat menuju desa mandiri di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, dan kendala yang dihadapi oleh pendampingan desa dalam mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan ketiga penelitan terdahulu diatas maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada focus penelitan dimana pada penelitian ini berfokus pada Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang.

B. Landasan Teori

1. Kinerja

a. Pengertian Kinerja

Menurut Rue & Byars dalam Pasolong (2014) mengatakan bahwa kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil. Gibson dalam Pasolong (2014) mengatakan bahwa kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan.

Dikatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan ditentukan oleh interaksi antara kemampuan dan motivasi. Menurut Widodo dalam Pasolong (2014) mengatakan bahwa kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Menurut Simamora (2003) Kinerja adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya. Sedangkan Shaidily (1992) mengatakan kinerja atau performance adalah berdaya guna prestasi atau hasil. Wahyudi Kumorotomo (1996) memberikan batasan pada konsep kinerja organisasi public setidaknya berkaitan erat dengan efisiensi, efektifitas, keadilan dan daya tanggap. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian mengenai kinerja instansi pemerintah, bahwa kinerja merupakan proses pencapaian tujuan tertentu dan dalam kurun waktu tertentu, sesuai tanggungjawab masing-masing dengan batasan yang telah ditetapkan, dengan memfokuskan pada tujuan yang ingin

dicapai melalui visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis secara jelas dan legal agar nantinya terlihat hasil kinerja yang memuaskan.

b. Indikator Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah sangat dibutuhkan adanya indikator yang jelas oleh stakeholders. Guna mengemban tugas, fungsi dan tanggungjawab pemerintah desa harus lebih mengedepankan pelayanannya terhadap program pembangunan infrastruktur karena akan dilihat nantinya sejauh mana kinerja dan hasil yang sudah dicapai oleh Pemerintah Desa . Agus Dwiyanto, dalam Pasolong (2014) menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu:

- a) Produktivitas, yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian mencoba mengembangkan suatu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting dijadikan tolak ukur dalam menjalankan tugasnya tanpa mengindahkan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ingin dilihat dari indikator produktivitas jika dikaitkan dengan penelitian ini adalah bagaimana Kinerja PemerintahDesa dalam kemampuan menyelesaikan Pembangunan

- b) Kualitas Layanan Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik.
- c) Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimaksudkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang secara otomatis kinerja organisasi tersebut jelek. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi mewujudkan misi dan tujuan organisasi. Yang ingin dilihat dari indikator responsivitas ini yaitu kemampuan dalam menerima dan merealisasikan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan
- d) Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit

maupun implisit, Lenvine dalam Dwiyanto (2006). Oleh sebab itu, tanggungjawab bisa saja pada suatu Ketika berbenturan dengan tanggungjawab, yang ingin dilihat dalam penelitian ini melalui indikator tanggungjawab adalah bagaimana Tanggungjawab Pemerintah Desa dalam Pembangunan

- e) Akuntabilitas public dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik itu konsisten dengan kehendak publik. Kinerja birokrasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh birokrasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Yang ingin dilihat dari indikator akuntabilitas melalui penelitian ini adalah menyangkut bagaimana pembuatan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat dalam Pembangunan (Budi & Ahmad, 2019).

2. Pemerintah Desa

a. Konsep Pemerintah Desa

Pemerintahan desa memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa masyarakatnya kepada kehidupan sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan. Seperti yang disampaikan oleh Dwipayana dkk (2003:22) bahwa pemerintahan desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparansi dan responsif) bisa semakin kokoh dan mampu bekerja

secara efektif bila ditopang oleh kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan antar elemen di desa.

Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada dasarnya pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya pemerintah diadakan untuk melayani masyarakat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan Bersama (Endah, 2014).

Nurcholis (2009) Pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa
- b. Unsur Pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas :
 1. Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa
 2. Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lains
 3. Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), mengartikan pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah langsung dibawah kepala desa atau lurah yang menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiridan terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat (Azwat, 2020) .

b. Jenis-Jenis Desa

Dalam Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa disebutkan susunan organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa Berdasarkan klasifikasi desa. Maka desa di Indonesia dibagi dalam 3 jenis desa, yaitu Desa Swadaya, Desa Swakarya dan Desa Swasembada. Berikut pengertian desa beserta ciri- cirinya berdasarkan klasifikasi desa sesuai tingkat perkembangan desa.

1) Desa Swadaya dalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya. Ciri-ciri desa swadaya, sebagai berikut:

- Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya
- Penduduknya jarang.
- Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris.
- Bersifat tertutup.
- Masyarakat memegang teguh adat.

- Teknologi masih rendah.
- Sarana dan prasarana sangat kurang.
- Hubungan antarmanusia sangat erat.
- Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

2) Desa Swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Desa Swakarya dengan ciri-ciri, sebagai berikut

- Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh.
- Sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi
- Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian.
- Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain.
- Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.

3) Desa Swasembada (Mandiri) adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada, sebagai berikut:

- Kebanyakan berlokasi di ibukota kecamatan.
- Penduduknya padat-padat.
- Tidak terikat dengan adat istiadat

- Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain.
- Partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2016 menjelaskan bahwa jumlah perangkat desa akan ditentukan sesuai klasifikasi desa menurut tingkat perkembangannya. Desa swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi. Desa Swakarya dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi, sedangkan untuk Desa Swadaya memiliki 2 urusan dan 2 seksi (Ardita, 2019).

3. Pendamping Desa

a. Pengertian Pendamping Desa

Pendamping desa adalah seseorang yang berupaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Sedangkan menurut pasal 1 angka (13) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PermenDesaPDTTTrans) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Pendampingan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah baik

Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional baik di Kabupaten maupun Kecamatan serta Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas:

- a) Tenaga pendamping profesional (pendamping Desa berkedudukan di kecamatan, pendamping Teknis berkedudukan di Kabupaten, dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di Pusat dan Provinsi).
- b) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Pengerajin, Kelompok Perempuan, Kelompok pemerhati dan Perlindungan Anak, Kelompok Masyarakat Miskin dan Kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa).
- c) Pihak ketiga (Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan, Perusahaan).

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015, pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa. Pendamping Desa, bukan pengelola proyek pembangunan di desa. Kerja Pendampingan Desa difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat desa melalui proses belajar sosial. Dengan demikian, pendamping desa tidak dibebani dengan tugas-tugas pengelolaan administrasi keuangan dan

pembangunan desa yang berdasarkan Undang-Undang Desa sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah desa.

b. Syarat-syarat Pendamping Desa

Menurut pasal 24 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- b. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat Desa;
- c. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat Desa;
- d. Mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat Desa dalam musyawarah Desa; dan/atau Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Desa.

Kompetensi pendamping teknis memenuhi unsur kualifikasi sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
- b. Memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat;
- c. Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan; dan/atau

- d. Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya.

c. Tugas Pendamping Desa

Tugas dan Fungsi Pendamping Desa dalam mensukseskan penggunaan dana desa Penggunaan dana desa harus dikawal dan didampingi dengan ketat, agar tujuan pencairannya, yaitu dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada dapat tercapai dengan sukses. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 12 pendamping desa melaksanakan tugas mendampingi desa, meliputi:

- a) Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b) Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c) Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, Lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- d) Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok – kelompok masyarakat Desa;
- e) Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- f) Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif;
- g) Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

d. Tujuan Pendamping Desa

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, tujuan pendampingan desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
- b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
- d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

e. Landasan Hukum Pendamping Desa

- a) Berikut adalah landasan hukum yang mendasari kewenangan tentang Pendamping Desa:
- b) Undang-Undang Dasar 1945;
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- i) Peraturan Presiden 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- j) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa(Reza, 2017).

4. Pembangunan Desa

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. Disamping itu pembangunan Perencanaan Pembangunan Desa juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem social ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga – lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, penganguran kesenjangan dan pembrantasan kemiskinan absolut. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan bearti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itusendiri. Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian memberikan pengertian tentang bagaimana pembangunan sebagai “ suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara , dan pemerintah, menuju modernitas dalamrangka Pembinaan Bangsa (Nation Building). Adapun Kartasmita memberikan pengertian yang lebihsederhana tentang pembangunan yaitu : “ suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Upaya untuk memahami makna dan strategi pembangunan yang tepat telah melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu akibatnya konsep pembangunan menjadi multi interpretable namun disamping itu pembangunan harus dipahami

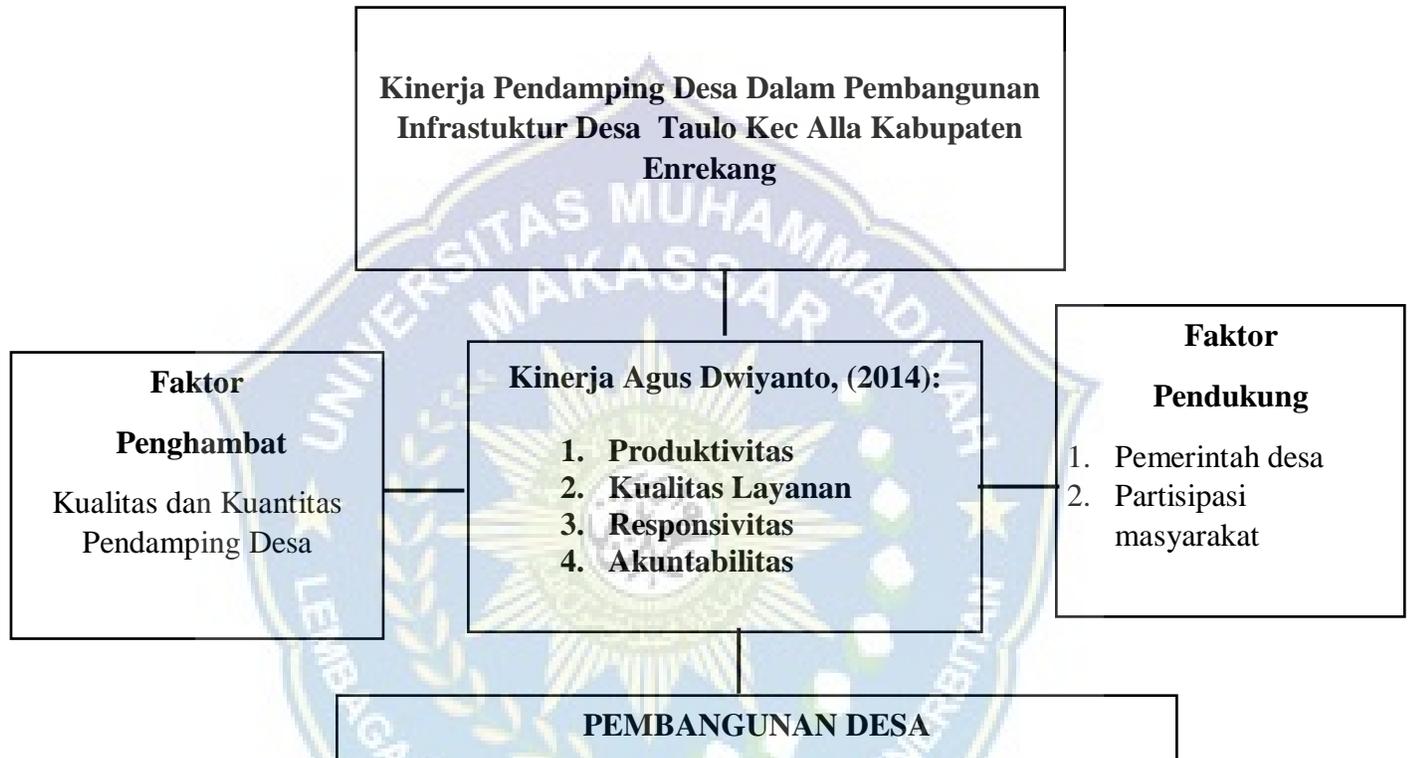
sebagai proses multi dimensional dan mencakup perubahan orientasi dan system organisasi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Todaro melihat pembangunan sebagai : “Proses yang multi dimensional dari struktur masyarakat, perilaku, kelembagaan, perkembangan ekonomi, pengurangan kepincangan dan penghapusan kemiskinan absolute dari masyarakat. Tiga nilai yang menjadi tujuan pembangunan adalah :

- 1) Live sustainance atau terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan, papan, kesehatan dan perlindungan dari ancaman,
- 2) Self esteem, kemampuan untuk menjadi diri sendiri,
- 3) Freedom for servitude, yaitu kemampuan untuk memilih secara bebas.



C. Kerangka Fikir

Kerangka fikir adalah menjelaskan secara garis besar mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka fikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1 Kerangka Fikir

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian kualitatif bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisahkan) sehingga penelitian kualitatif menetapkan penelitiannya berdasarkan dari keseluruhan situasi sosial yang terjadi atau diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi sehingga focus pada penelitian ini yaitu Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa (studi kasus di tiga desa tertinggal, menengah, dan maju dari segi pembangunan) kabupaten Enrekang

E. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Produktivitas yaitu tingkat efektifitas kinerja pendamping desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang
2. Kualitas Layanan yaitu kualitas kinerja diri pendamping desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang
3. Responsivitas yaitu kinerja pendamping desa dalam merespon masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang
4. Akuntabilitas yaitu kebijakan yang di implementasikan sebagai bentuk pembangunan infrastruktur di Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang
5. Faktor Penghambat dan factor pendukung kinerja pendamping desa dalam pembangunan desa di Kabupaten Enrekang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Taulo Kecamatan Alla di Kabupaten Enrekang alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut ingin mengetahui kinerja dari pendamping desa dalam pembangunan desa di Kabupaten Enrekang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan setelah pelaksanaan seminar proposal.

A. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Williams (2008) penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian lainnya dalam beberapa hal. Dalam hubungan ini, Williams menyebutkan dalam tiga hal pokok yaitu (1) pandangan-pandangan dasar (axioms) tentang sifat realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, posibilitas penarikan generalisasi, posibilitas dalam membangun jalinan hubungan kausal, serta peranan nilai dalam penelitian. (2) karakteristik pendekatan penelitian kualitatif itu sendiri, dan (3) proses yang diikuti untuk melaksanakan penelitian kualitatif (Ahyar et al., 2020).

2. Tipe Penelitian

Dalam buku Metode Penelitian Deskriptif & Kuantitatif, Jhon W. Best (1977) menyatakan bahwa studi kasus berkenaan dengan segala sesuatu yang bermakna dalam sejarah atau perkembangan kasus yang bertujuan untuk memahami siklus kehidupan atau bagian dari siklus kehidupan suatu unit individu (perorangan, keluarga, kelompok, pranata sosial suatu masyarakat) (Ahyar et al., 2020).

B. Sumber Data

1. Data Primer data yang diperoleh langsung dari Informan desa Kabupaten Enrekang.
2. Data Sekunder diperoleh dengan cara mengambil data dari buku, jurnal, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

C. Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Informan Penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Menurut Bagong Suyanto (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

- 1) Informan Kunci (Key Informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- 2) Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

- 3) Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Adapun Informan Pada Penelitian ini yaitu :

No	Nama	Jabatan
1.	Herman SE	Kepala Desa Taulo
2.	M. Yusran SE	Sekretaris Desa
3.	Adnan	Anggota BPD
4.	Budi SS	Masyarakat Desa Taulo
5.	Rendra Zulmi	Masyarakat Desa Taulo

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan dimungkinkan jika respondennya berjumlah sedikit (Dr. Ismael Nurdin, Dra. Sri Hartati, 2019).

2. Observasi

Menurut Bachtiar (1980) dalam Muslimin (2002) diperlukan cara yang relatif murah dan prosedur metodologis sederhana bagi suatu penelitian berkualitas, metode observasi dalam kondisi seperti ini sangat membantu. Jadi, teknik observasi

sangat membantu para peneliti yang mengalami kesulitan dalam segi pendanaan dan keterbatasan tenaga terampil yang berkualitas untuk membantu penelitiannya (Ahyar et al., 2020).

3. Dokumentasi

Sugiyono (2015) merupakan dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Dokumen yang berbentuk karya misalnyakarya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Dr. Ismael Nurdin, Dra. Sri Hartati, 2019) .

E. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992) Analisis dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) reduksi data (data reduction); (2) penyajian data (data display); dan (3) penarikan simpulan.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa narasi deskriptif kualitatif, walaupun ada data dokumen yang bersifat kuantitatif juga bersifat deskriptif. Tidak ada analisis data secara statistik dalam penelitian kualitatif. Analisisnya bersifat

naratif kualitatif, mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan informasi.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpecah-pecah, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Ahyar et al., 2020).

F. Teknik Pengabsahan Data

Menurut Moloeng (2007), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Beberapa macam triangulasi data sendiri menurut Denzin dalam Moleong (2004) yaitu dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori ada beberapa macam yaitu :

1. Triangulasi Sumber (data)

Triangulasi ini membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda dalam metode kualitatif.

2. Triangulasi Metode

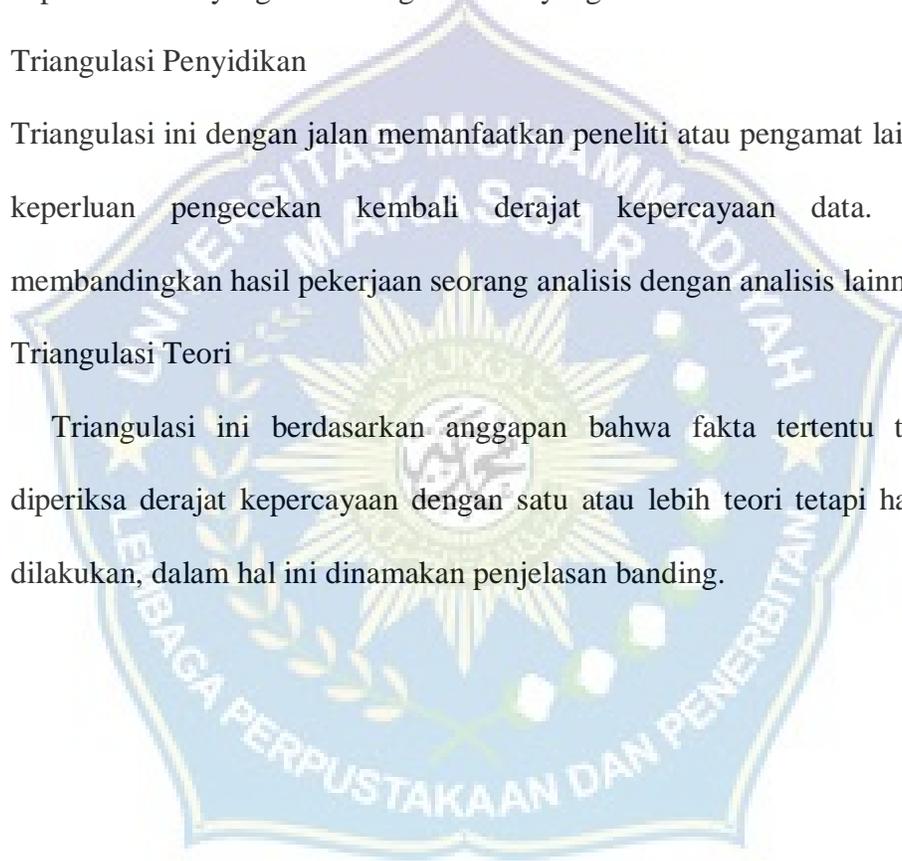
Triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Penyidikan

Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Contohnya membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.

4. Triangulasi Teori

Triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapi hal itu dapat dilakukan, dalam hal ini dinamakan penjelasan banding.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHSAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

a. Sejarah Kabupaten Enrekang

Kabupaten enrekang merupakan salah-satu kabupaten yang ada di provinsi sulawesi selatan Sejak abad XIV, daerah ini disebut MASSENREMPULU yang artinya daerah pinggiran gunung atau menyusur gunung, sedang sebutan Enrekang berasal dari ENDEG yang artinya NAIK DARI atau PANJAT merupakan asal mulanya sebutan ENDEKAN. Sedangkan versi lain mengatan bahwa kata ENREKANG berasal dari bahasa Bugis yang berarti daerah pegunungan. Mengapa orang bugis mengatakan demikian dapat dimengerti sebab lokasi kabupaten Enrekang $\pm 85\%$ dari seluruh luas wilayah dikelilingi oleh gunung dan bukit yang membentang disepanjang wilayah kabupaten Enrekang yang luasnya $\pm 1.786.01 \text{ Km}^2$. Menurut sejarah, pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar yang bernama MALEPONG BULAN, kemudian kerajaan ini bersifat MANURUNG dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 kawasan/kerajaan yang lebih dikenal dengan federasi "PITUE MASSENREMPULU", yaitu: 1. Kerajaan Endekan yang dipimpin oleh Arung/Puang Endekan 2. Kerajaan Kassa yang dipimpin oleh Arung Kassa' 3. Kerajaan Batulappa' yang dipimpin oleh Arung Batulappa' 37 38 4. Kerajaan Tallu Batu Papan (Duri) yang merupakan gabungan dari Buntu Batu, Malua,

Alla'. Buntu Batu dipimpin oleh Arung/Puang Buntu Batu, Malua oleh Arung/Puang Malua, Alla' oleh Arung Alla' 5. Kerajaan Maiwa yang dipimpin oleh Arung Maiwa 6. Kerajaan Letta' yang dipimpin oleh Arung Letta' 7. Kerajaan Baringin (Baringeng) yang dipimpin oleh Arung Baringin Pitu (7) Massenrempulu' ini terjadi kira-kira dalam abad ke XIV M. Tetapi sekitar pada abad ke XVII M, Pitu (7) Massenrempulu' berubah nama menjadi Lima Massenrempulu' karena Kerajaan Baringin dan Kerajaan Letta' tidak bergabung lagi ke dalam federasi Massenrempulu. Akibat dari politik *Devide et Impera*, Pemerintah Belanda lalu memecah daerah ini dengan adanya Surat Keputusan dari Pemerintah Kerajaan Belanda (Korte Verkaling), di mana Kerajaan Kassa dan kerajaan Batu Lappa' dimasukkan ke Sawitto. Ini terjadi sekitar 1905 sehingga untuk tetap pada keadaan Lima Massenrempulu' tersebut, maka kerajaan-kerajaan yang ada didalamnya yang dipecah.

b. Letak Geografis

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3014'36'' – 3050'0'' Lintang Selatan dan antara 119040'53'' – 12006'33'' Bujur Timur. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja, Sebelah Timur : Kabupaten Luwu, Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap, Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang Luas wilayah kabupaten ini adalah 1.786,01 km² atau

sebesar 2,83 persen dari luas Propinsi Sulawesi Selatan. Wilayah ini terbagi menjadi 12 kecamatan dan secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang lebih kecil yaitu terdiri dari 129 wilayah desa/kelurahan. Luas masing-masing kecamatan yaitu Maiwa (392,87 Km²), Bungin (236.84 Km²), Enrekang (291.19 Km²), Cendana (91.01 Km²), Baraka (159.15 Km²), Buntu Batu (126.65 Km²), Anggeraja (125.34 Km²), Malua (40.36 Km²), Alla (34.66 Km²), Curio (178.51 Km²), Masalle (68.35 Km²), and Baroko (41.08 Km²).

Kabupaten Enrekang terdiri dari 12 Kecamatan dengan 129 desa dan kelurahan. Jumlah Kelurahan dan Desa berdasarkan kecamatan diantaranya, Maiwa terdiri 22 Kelurahan dan Desa, Bungin terdiri 6 Desa, Enrekang terdiri 18 Kelurahan dan Desa, Cendana terdiri 8 Desa, Baraka terdiri 15 Kelurahan dan Desa, Buntu Batu terdiri 8 Desa, Anggeraja terdiri 15 Kelurahan dan Desa, Malua terdiri 8 Desa, Alla terdiri 8 Kelurahan dan Desa, Curio terdiri 11 Desa, Masalle terdiri 6 Desa, dan Baroko terdiri 5 Desa.

c. Keadaan Penduduk

Penduduk Kabupaten Enrekang berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 225.172 jiwa yang terdiri atas 114.627 jiwa penduduk laki-laki

dan 110.545 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk tahun 2020, penduduk kabupaten Enrekang mengalami pertumbuhan selama sepuluh tahun sebesar 18,36 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 104,09.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Enrekang tahun 2020 mencapai 126,08 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Alla dengan kepadatan sebesar 695,79 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bungin sebesar 23,26 jiwa/Km². Jumlah pencari kerja terdaftar di Kab Enrekang pada tahun 2020 tercatat 354 pekerja.

2. Gambaran Umum Desa Taulo

a. Keadaan Geografis

Desa Taulo adalah salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Alla dan berada di bagian utara Kabupaten Enrekang. Jarak tempuh wilayah Desa Taulo dari Ibukota Kabupaten Enrekang 49 km. Desa ini memiliki luas wilayah 404 Km² , dengan potensi lahan yang produktif diantaranya lahan perkebunan, lahan

pertanian dan hutan. Letak geografis Desa Taulo berada di wilayah utara Kabupaten Enrekang. Adapun batas wilayah Desa Taulo adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Salassa. b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bolang. c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kalosi. d.

Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mekkala. Secara geografis Desa Taulo memiliki kondisi daerah yang berbukit-bukit, berada diatas gunung dengan ketinggian 580 m diatas permukaan laut. Kondisi tanah cukup subur untuk ditanami berbagai jenis tanaman, baik tanaman jangka pendek maupun jangka panjang. Desa Taulo sendiri memiliki iklim tropis yaitu musim kemarau dan musim hujan.

b. Keadaan Demografis

Desa Taulo memiliki luas wilayah 404 Km² . Kepadatan penduduk sudah mencapai 1.268 jiwa penduduk tetap dengan jumlah kepala keluarga 258, penduduk laki-laki sebanyak 568 jiwa dari seluruh jumlah penduduk sementara penduduk perempuan sebanyak 700 dari seluruh jumlah penduduk. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali saat ini. Masyarakat Desa Taulo Kecamatan Alla

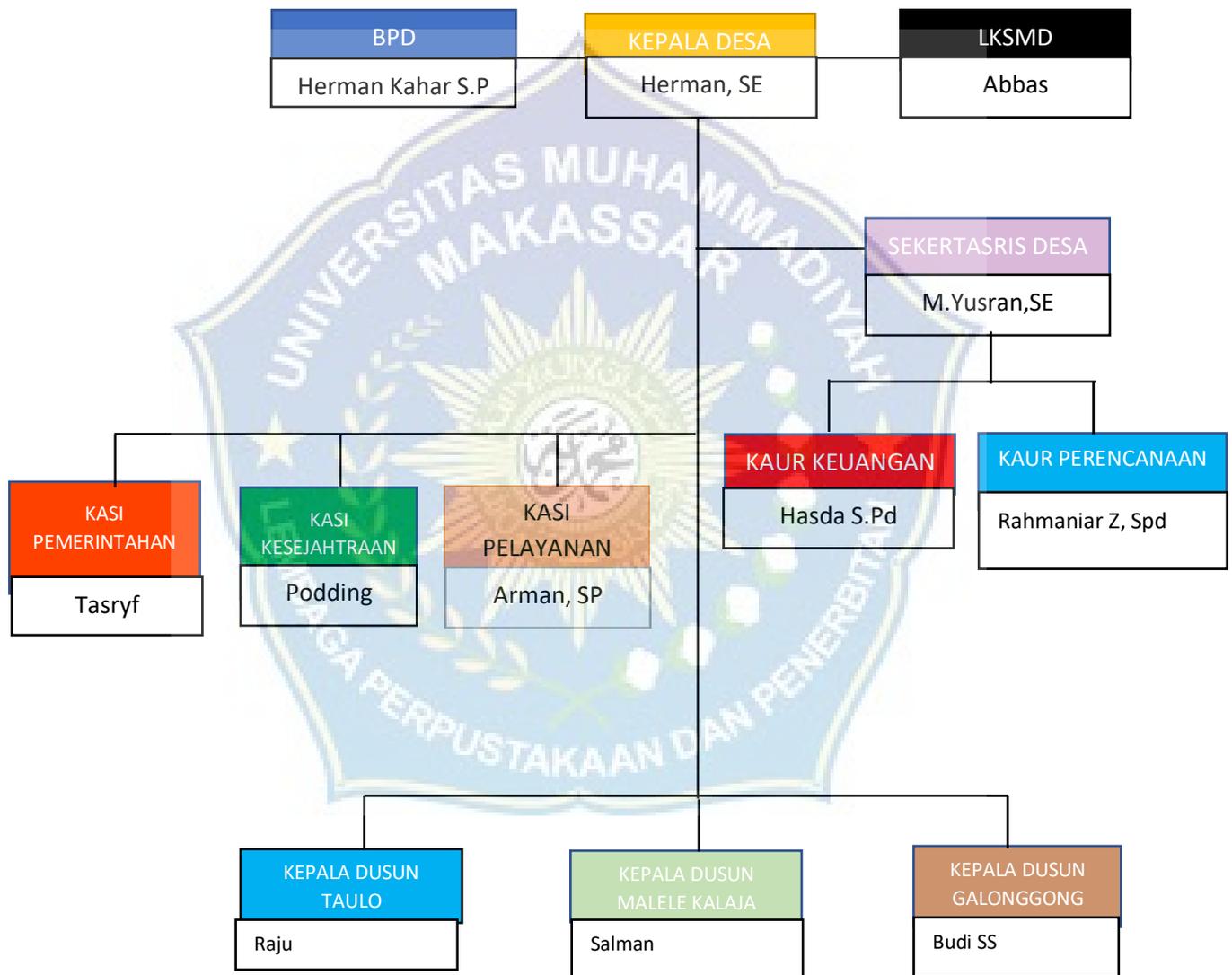
Kabupaten Enrekang 100% beragama Islam. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani.



c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Taulo

Kec.Alla Kabupaten Enrekang



B. Hasil Penelitian

Pembangunan Daerah adalah suatu kegiatan sistematis yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pada era reformasi ini pemerintah menerapkan sebuah sistem yaitu sistem desentralisasi sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini menjadi landasan hukum yang mengelola hubungan antara pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan menjadilandasan hukum penerapan sistem otonomi daerah di Indonesia. Kemudian Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 menyebutkan bahwa adanya perluasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan terutama dalam penerimaan (*revenue*) dan pengeluaran (*expenditure*). Pemerintahan Desa menyelenggaraan urusan pemerintahan sekaligus memenuhi segala kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kedudukannya tersebut, pemerintah Desa berupaya melakukan pembenahan menuju arah kemandirian desa. Pasal 215 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga, harus mengikut sertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

1. Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang

Pembangunan yang sering sekali didefinisikan dengan perubahan menuju kerah yang lebih ternyata memiliki banyak indikator agar kenyataan dilapangan sesuai dengan definisinya mulai dari pertumbuhan ekonomi, meningkatnya moral pada diri masyarakat, mutu pendidikan yang lebih baik, rendahnya tingkat kesenjangan dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang harus dilakukan secara adil dan merata bagi seluruh warga Negara. Strategi Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan merupakan bagian tugas dalam menjalankan, baik pemerintahan pusat Daerah maupun perdesaan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengemukakan bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya Sendiri dalam ikatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah itu tercantum prinsip-prinsip-pelaksanaan yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah dan keanekaragaman daerah di dalam pelaksanaan otonomi daerah, desa merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, desa merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut, hal ini berarti bahwa pembangunan desa tidak dipisahkan dari pembangunan nasional dan merupakan unsur pokok dalam sistem pembangunan Indonesia.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menurut masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Solekhan, 2014). Pengaturan desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam merespon proses modernisasi, globalisasi, dan demokratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya (Putri, 2016). Salah satu wujud konkritnya adalah dengan diharuskannya pembentukan pendamping desa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Terbentuknya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di tingkat desa (Suharto, 2020). Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan secara

partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sendiri.

Pendamping desa adalah suatu jabatan yang dibawah Kementrian Desa pembangunan daerah tertinggi dan transmigrasi. Indonesia ditugaskan mendampingi pemerintah pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka mengimplementasikan undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Pendampingan desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa saja, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan dana desa saja, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa. Pendampingan Desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa. Pendampingan Masyarakat Desa ini dilaksanakan agar adanya pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di desa dapat tercapai dengan cepat. Sehingga fasilitasi pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan masyarakat desa perlu dilakukan untuk mendorong penggunaan dana desa.

a. Produktivitas

Produktivitas kerja aparat pemerintah merupakan hubungan antara kualitas yang dilakukan untuk mencapai hasil, dimana produktifitas adalah kekuatan atau kemampuan menghasilkan sesuatu yang bersifat materil maupun non materil yang menggambarkan kemampuan aparatur dalam bekerja

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu sempit dan kemudian *General Accounting Office (GAO)* mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

Dalam pemerintahan yang baik hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat, yang berarti bahwa adanya hubungan yang kompleks antara tiga elemen tersebut (Rahmanurrajjid, 2008). Sama halnya dengan kebijakan adanya program pendamping desa, jadi antara pemerintah desa, pendamping desa, serta masyarakat membutuhkan kerjasama yang baik. Oleh sebab itu ketiganya harus berjalan secara sinergis dalam mewujudkan tujuan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menginginkan peningkatan pendamping desa dalam menjalankan peran dan fungsinya, dapat melakukan proses studi atau kajian secara berkesinambungan dengan sesama pendamping sebagai tim kerja (team work) supaya lebih terbantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan,

potensi sumber daya dan prospek pembangunan di desa. Kajian dilakukan untuk menjalin kedekatan atau memastikan tidak ada jarak antara pendamping desa dengan masyarakat. Berikut hasil wawancara bersama HN sebagai Kepala Desa Taulo

“ Produktivitas artinya pencapaian yang telah di peroleh dari kinerja pemerintah desa dan juga pendamping desa dalam membangun desa sejauh ini berjalan sesuai dengan program kerja baik itu secara fisik atau non fisik”(Wawancara pada 31 Januari 2023)

Selanjutnya di sampaikan juga MY sebagai Sekertaris Desa

“program kerja pemerintah desa untuk secara fisik Pembangunan yang di lakukan di desa Taulo ada pembangunan jalan ,pembuatan saluran air serta juga perbaikan jempatan sehingga jika dilihat dari pembangunan yang telah di lakukan kinerja dari pemerintah beserta pendaming desa dalam membangun atau mengawal proses pembangunan berjalan dengan baik “(Wawancara Pada 31 Januari 2023)

Selanjutnya hasil Wawancara Bersama A Sebagai Anggota BPD

“Pembangunan yang ada tentunya sudah ada dalam program kerja pemerintah desa kemudian sebagai pendamping desa tentu kami mendampingi proses kinerja fisik maupun non fisik ,Kalo kita lihat dari bentuk pembangunan baik yang telah di lakukan atau yang sementara berlangsung kinerja pemeintah desa dan BPD sebagai badan pendamping desa sudah cukup mengawal pembangunan didesa Taulo “(Wawancara Pada 31 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada indikator Produktivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang berjalan sesuai dengan Indikator Produktivitas yang di maksud poduktifitas pada penelitian ini tingkat kemajuan kinerja dari pendamping desa Taulo dalam pembangunan Infrastruktur.

Hal Senada disampaikan juga B sebagai Masyarakat Desa

“Melihat pembangunan yang ada menurut saya pemerintah telah menjalankan tanggung jawabnya dengan baik serta juga melibatkan masyarakat “. (Wawancara Pada 1 Februari 2023)

Selanjutnya RZ Masyarakat Desa Menyampaikan

“Alhamdulillah Pembangunan di desa Taulo berjalan dengan baik karena kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang bagus karna kan setiap program yang di lakukan pemerintah tentunya perlu adanya kerja sama dan juga komunikasi yang baik “(Wawancara Pada 1 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang pada indikator produktifivitas secara keseluruhan berjalan dengan baik dilihat dari capaian pembangunan yang telah di lakukan oleh pemerintah desa.



Gambar 4.1

PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

b. Kualitas Layanan

Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja Pemerintah dalam pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari pemerintah. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja Pemerintah. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan sering kali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Kualitas pelayanan Pemerintah adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan pegawai dalam pemberian layanan/melayani keperluan orang atau masyarakat dari kemampuan dan keandalan pegawai untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya, kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, komputersasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi, kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat.

Pada penelitian ini Kualitas layanan yang dimaksud yaitu Kualitas layanan yang di berikan pemerintah desa dalam hal ini pendamping desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Taulo Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang.

Berikut Hasil wawancara Bersama HN sebagai Kepala Desa Taulo

“Dalam memberikan layanan kepada masyarakat pemerintah desa berusaha memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dengan tidak mengkotak-kotakkan masyarakat semua bentuk layanan dilakukan sama tidak dibedakan serta menindak lanjuti bentuk keluhan masyarakat yang kemudian di musyarahkan bersama dalam mencari solusi “. (Wawancara Pada 31 Januari 2023)

Selanjutnya di sampaikan A Sebagai Anggota BPD

“Pendamping desa sebagai media penyambung antra masyarakat dan pemerintah desa tentunya dalam menyampaikan keluhan selain disampaikan secara formal juga dilakukan secara individu di rumah masyarakat jika diluar jam kerja maka akan di sampaikan pada saat jam kerja melalui musyawarah “ (Wawancara Pada 31 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat pemerintah desa dalam memberikan layanan kepada masyarakat di lakukan dalam berbagai cara baik itu secara formal maupun non formal.

Hal serupa disampaikan B Masyarakat Desa

“ menurut saya pelayanan pemerintah desa bagus kami masyarakat kalo ada penyampaian atau ada yang mau di urus mudah dipahami, dan kalo soal pembangunan pemerintah desa juga sudah membangun desa secara fisik seperti perbaikan jalan dan perbaikan saluran air “ (Wawancara Pada 1 Februari 2023)

Selanjutnya disampaikan juga RZ Masyarakat Desa

“Kualitas Pelayanan Pemerintah desa secara keseluruhan bagus apalagi dalam membangun desa sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari “ (Wawancara Pada 1 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat Kinerja Pendamping

Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Taulo berjalan dengan baik

Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat desa dengan mendengarkan serta melibatkan masyarakat dalam berbagai program yang dibuat oleh pemerintah desa.

c. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan pemerintah untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat Berikut wawancara bersama HN sebagai Kepala Desa Taulo

“Alhamdulillah pemerintah merespon keluhan masyarakat dengan baik bentuk tindak lanjut dari pemerintah desa sendiri melakukan musyawarah kemudian dilihat yang mana yang merupakan kebutuhan dari masyarakat dan memang perlu untuk segera di tindak lanjuti maka itu yang akan di proses dan pemerintah desa pun dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan masyarakat desa” (Wawancara Pada 31 Januari 2023)

Berikut hasil Wawancara Bersama MY sebagai Sekertaris Desa

“ Pemerintah desa sebagai penampung aspirasi masyarakat tentunya harus bisa mengutamakan yang menjadi kebutuhan masyarakat, selaku pemerintah desa harus lebih mengutamakan masyarakat dalam program yang berhubungan dengan desa seperti program pendampingan desa, yang

melaksanakan program pembangunan di desa ini masyarakat ikut dalam pelaksanaan, seperti gotong royong” (Wawancara Pada 31 Januari 2023)

Selanjutnya Wawancara Bersama A Sebagai Anggota BPD

“Dalam merespon keluhan atau keresahan masyarakat tidak hanya dilakukan pada saat rapat saja tetapi melihat juga situasi yang terjadi di tengah masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti atau di sampaikan kepada pemerintah desa “(Wawancara Pada 31 Januari 2023)

Hal serupa disampaikan B Masyarakat Desa

“Pemintah desa yang sekarang cepat dalam merespon keluhan masyrakat dan dalam membangun masyakat juga ikut gotong royong bekerja bersama-sama “(Wawancara Pada 1 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pada indikator Responsivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo memberikan pelayanan dengan menanggapi keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti melalui di adakannya rapat sampai pada proses pelaksanaanya.

d. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas, dalam konteks pelayanan publik, berarti suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran, nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholders.

Akuntabilitas Publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat public yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih

oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep dasar akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Akuntabilitas yakni suatu kewajiban seseorang atau unit dalam organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan atau pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya dalam pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas pula menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu atau pemerintah.

Berikut hasil wawancara bersama HN sebagai Kepala Desa Taulo

“Dalam menjalankan program tentunya pemerintah desa saling bekerjasama baik terutama pendamping desa dalam mendampingi atau memonitori program-program yang di jalan kan “(Wawancara Pada 31 Januari 2023)

Wawancara Bersama A Sebagai Anggota BPD

“Untuk program kerja yang saya damping sendiri lumayan banyak dimana terbagi dari empat bidang yaitu; bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat dan pembiayaan pemerintahan desa, untuk pembangunan infrastruktur sendiri itu seperti perbaikan jalan, pembuatan saluran air serta perbaikan jembatan” (Wawancara Pada 31 Januari 2023)

Selanjutnya berikut hasil wawancara bersama B Masyarakat Desa

“Kinerja dari pemerintah desa atau pendamping desa dalam pembangunan bagus terlebih dalam menyampaikan atau memberikan informasi kepada masyarakat “(Wawancara Pada 1 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas pada indikator Akuntabilitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Taulo bertanggung jawab dalam mendampingi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari beberapa pembangunan yang telah dilaksanakan yang berjalan dengan baik.

Tabel Laporan Anggaran Pembangunan Infrastruktur desa tahun 2022

Kegiatan Sarana & Prasarana	Volume Objek	Anggaran tahun 2022	
		Rencana	Realisasi
Pembangunan Jembatan	4m x 3m V= 12 m ³	Rp. 81.149.890	Rp. 81.149.890
Pembangunan Irigasi	161 m x 1 m V= 161 m ³	Rp.90.996.000	Rp. 89.058.000

Sumber : Kantor Desa Taulo, 2022

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang

Pendampingan desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa saja, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan dana desa saja, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa. Pendampingan Desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa. Pendampingan Masyarakat Desa ini dilaksanakan agar adanya pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di desa dapat tercapai dengan cepat. Sehingga fasilitasi pemerintahan desa, pembangunan desa.

Terbentuknya Pendampingan Desa memiliki tujuan untuk mempercepat pembangunan desa supaya dapat mensejahterakan masyarakat pedesaan dapat terwujud. Perlunya pembinaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang partisipatif untuk kemajuan desa. Adanya pendampingan desa diharapkan dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari pemerintah desa dan masyarakat. Pembangunan fasilitas dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa menjadi bagian dari pembangunan.

a. Faktor Penghambat

Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat

dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Pemerintah Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian sarta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai namun dalam pemenuhannya tentu terdapat faktor penghambat yang memengaruhi proses pembangunan

Berikut hasil wawancara bersama HN sebagai Kepala Desa Taulo

“Kendala yang ditemui hanyapada saat pelaksanaan rapat karena yang datang saat pembahasan pembangunan yang terkadang lebih banyak yakni orang-orang yang kurang mengerti. Dan juga orang-orang yang kurang mampu bicara.” (Wawancara Pada 31 Januari 2023)

Wawancara Bersama A Sebagai Anggota BPD

“Berbicara mengenai standar kebutuhan pendampingan di desa Taulo, sebenarnya masih tidak ideal, masih kurangnya kerja sama sesama anggota BPD serta sering bertabrakannya kesibukan dari anggota BPD sehingga kinerja kurang maksimal meskipun tetap semua yang terlibat baik itu kepala desa maupun staf lain tetap turun langsung “ (Wawancara Pada 31 Januari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bawa dalam Kinerja Pendamping Desa dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang terdapat faktor penghambat diantaranya yaitu kuantitas dan kualitas dari pendamping desa yang masih kurang.

b. Faktor Pendukung

Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat. Perencanaan Pembangunan Desa adalah perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan yang disusun sendiri oleh Desa secara partisipatif dan ditetapkan bersama oleh Kepala Desa dan BPD dengan Peraturan Desa. Dalam meningkatkan kapasitas masyarakat diperlukan adanya kegiatan pendampingan ini sebagai agen pemberdayaan yang tugasnya bukan mengkurui, tetapi lebih tepat sebagai fasilitator, komunikator, dinamisator, dan pembimbing masyarakat di lapangan.

Berikut hasil wawancara bersama HN sebagai Kepala Desa Taulo

“Pembangunan yang ada di Desa Taulo sebagian besar adalah hasil musyawarah yang telah di laksanakan bersama masyarakat. Secara tidak langsung ide dan gagasan pembangunan awalnya merupakan bagian dari partisipasi masyarakat Desa Taulo, jadi mereka ‘masyarakat’ memang sudah berpartisipasi “ (Wawancara Pada 31 Januari 2023)

Wawancara Bersama A Sebagai Anggota BPD

“Yang menjadi faktor pendukung pembangunan desa antara lain yaitu sarana dan prasarana yang disediakan karena Ketika partisipasi masyarakat yang baik pun pasti akan mengurangi atau menghalangi proses pembangunan jadi salah nya itu sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah.”(Wawancara Pada 31 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pada faktor pendukung kinerja pendamping desa di Desa Taulo disebabkan oleh dua

faktor yang pertama yaitu partisipasi masyarakat dan yang kedua sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah desa.

C. Pembahasan

1. Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa

Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang

a. Produktivitas

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kinerja pendamping desa dalam pembangunan infrastruktur pada indikator Produktivitas.

Produktivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Taulo berjalan sesuai dengan indikator produktivitas dapat dilihat dari proses pembangunan yang telah dilakukan secara keseluruhan.

b. Kualitas Layanan

Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik.

Pada penelitiann ini yang dimaksudkan dengan kualitas pelayanan yaitu kualitas kinerja dari pendamping desa dalam pembangunan infrastruktur kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat desa dengan mendengarkan serta melibatkan masyarakat dalam berbagai program yang dibuat oleh pemerintah desa.

Dengan demikian, kepuasan masyarakat dengan layanan pemerintah desa menjadi indikator dalam mengukur kinerja pendamping desa dalam hal ini sebagai pelayanan public salah satu ukuran kinerja pendamping desa dalam pelayanan. Sehingga kualitas pelayanan akan terlihat mudah, murah dan baik.

c. **Responsivitas**

Responsivitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun implisi. Pada penelitian ini yang di maksud responsivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo memberikan pelayanan dengan menanggapi keluhan masyarakat yang ditindak lanjuti melalui di adakannya rapat sampai pada proses pelaksanaanya untuk mencapai responsibilitas yang tinggi ini diperlukan

pekerjaan baik dan teratur sesuai dengan prinsip administrasi yang benar dan tepat dalam sebuah birokrasi pemerintahan.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsi adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. Akuntabilitas dalam sebuah organisasi memang menjadi hal yang sangat penting sebab akuntabilitas ini juga termaksud dengan tanggung jawab pendamping desa dalam pembanguna infrastruktur

Pada penelitian ini kuntabilitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo bertanggung jawab dalam mendampingi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari beberapa pembangunan yang telah di laksanakan yang berjalan dengan baik.

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang

Pendampingan desa bertujuan mempercepat pembangunan desa agar kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif juga

perlu dibina agar kemajuan desa dapat tercapai. Adanya pendampingan desa diharapkan dapat tercipta pembangunan yang partisipatif dari pemerintah desa dan masyarakat. Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang merupakan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia pedesaan dan masyarakat secara keseluruhan yang dilakukan secara berkelanjutan yang berlandaskan pada potensi dan kemampuan desa.

Tentunya terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung pada kinerja pendamping desa dalam pembangunan. Adapun faktor penghambat kinerja pendamping Desa Taulo yaitu kualitas dan kuantitas dari pendamping desa sedangkan faktor pendukung pada kinerja pendamping Desa Taulo yaitu partisipasi masyarakat serta sarana dan prasana di Desa Taulo.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan pada penelitian ini yaitu :

1. Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang
 - a. Produktivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Taulo berjalan sesuai dengan indikator produktivitas dapat dilihat dari proses pembangunan yang telah dilakukan secara keseluruhan.
 - b. Responsibilitas kinerja dari pendamping desa dalam pembangunan infrastruktur kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat desa dengan mendengarkan serta melibatkan masyarakat dalam berbagai program yang dibuat oleh pemerintah desa.
 - c. Akuntabilitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Taulo bertanggung jawab dalam mendampingi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari beberapa pembangunan yang telah dilaksanakan yang berjalan dengan baik.

Secara umum kinerja pendamping desa dalam pembangunan telah menunjukkan eksistensinya menuju perubahan sistem pemerintahan desa yang lebih baik

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung Kinerja Pendamping Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Taulo Kec Alla Kabupaten Enrekang

Faktor penghambat dan faktor pendukung pada kinerja pendamping desa dalam pembangunan. Adapun faktor penghambat kinerja pendamping Desa Taulo yaitu kualitas dan kuantitas dari pendamping desa sedangkan faktor pendukung pada kinerja pendamping Desa Taulo yaitu partisipasi masyarakat serta sarana dan prasana di Desa Taulo.

B. Saran

Keberadaan pendamping desa dimaksudkan untuk mendukung pembangunan desa. Perlu adanya peningkatan kualitas kinerja pendamping desa dalam perencanaan maupun pelaksanaan

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansah, Muhammad Fajri, Ika Sartika dan Andi Ony. “Kinerja Tenaga Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Jambi (Studi Di Desa Koto Jaya Dan Desa Tanah Tumbuh Kecamatan Tanah Tumbuh).” 8 (2022).
- Ahyar, h., maret, u. S., andriani, h., sukmana, d. J., mada, u. G., hardani, s.pd., m. S., nur hikmatul auliya, g. C. B., helmina andriani, m. S., fardani, r. A., ustiauwaty, j., utami, e. F., sukmana, d. J., & istiqomah, r. R. (2020). *Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif* (a. Husnu abadi, a.md. (ed.); issue march). Cv. Pustaka ilmu editor:
- Ardita, p. (2019). Strategi pemerintah daerah dalam program desa mandiri kesehatan di desa salukanan kecamatan baraka kabupaten enrekang. *Skripsi*, 1(1), 41–57.
- Azwat, n. (2020). Sinergitas pendamping desa dan pemerintah desa dalam pembangunan desa talle kecamatan sinjai selatan kabupaten sinjai nuryani. *Skripsi*, 2017(1), 1–9.
- B. Suswanto, r. Windiasih, a. I. Sulaiman, & s. W. (2019). Peran pendamping desa dalam model pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. *Jurnal sosial suderman*, 40–60.
- Budi, s., & ahmad, f. (2019). *Analisis kinerja pemerintah desa untuk pembangunan infrastruktur jalan usaha tani di desa matarah kecamatan dusun timur kabupaten barito timur*. 3(2), 162–178.
- Christina, m. (2017). Kinerja pendamping lokal desa dalam peningkatan pembangunan desa di kecamatan kalirejo kabupaten lampung tengah. *Skripsi*, 1–107.
- Djarot, Mitra Fandhu. “Analisis Pembangunan Sarana dan Prasarana Di Desa Simpang Tanah Lapangan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.” (t.thn.).

- Dr. Ismael nurdin, dra. Sri hartati, m. S. (2019). *Metodologi penelitian sosial* (s. H. Lutfiah (ed.); edisi ke-2). Penerbit media sahabat cendekia.
- Endah, k. (2014). *Penyelenggaraan pemerintahan desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa*. 150, 76–82.
- Hilman, Lutfi, Yaqub Cikusin dan Agus Zaenal Abidini. “Efektifitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Di desa Jambu Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenap).” 13 (2019).
- Julinda, g. F. (2019). *Peran pendamping kampung dalam pengelolaan kabupaten kutai barat*. 7(4), 1567–1580.
- Maimunah, Sassi, Afifuddin dan Suyeno. “Efektivitas Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Pembangunan Desa.” *Jurnal Respon Publik* 15 (2021).
- Ramantia. (n.d.). *Masyarakat desa (studi di desa bukit rawi kecamatan kahayan tengah kabupaten pulang pisau)*. 47–57.
- Reza, p. (2017). Kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa (studi di desa pugung raharjo kabupaten lampung timur). *Skripsi*.
- Susanti, m. H. (2017). Peran pendamping desa dalam mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat menuju desa mandiri di desa gonoharjo kecamatan limbangan kabupaten kendal. *Integralistik*, 29–39.
- Triyanto, d. (2018). Analisis kinerja pendamping desa dalam upaya membangun kemandirian desa. *Mimbar: jurnal penelitian sosial dan politik*, 7(2), 56. <https://doi.org/10.32663/jpsp.v7i2.669>

L

A

M

P

I

R

A

N



DOKUMENTASI







Dokumentasi Bersama pendamping desa,
Nama : Adnan
Tempat Tanggal Lahir : Belajen, 20 September 1984
Pekerjaan : Pendamping Lokal Desa
Pedidikan Terakhir : SMA





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (041) 3865588 Makassar 90221 E-mail: lp3muntashir@plasa.com



Nomor : 3265/05/C.4-VIII/XI/1444/2022
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

23 Rabiul Akhir 1444 H
17 November 2022 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel
di –

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1949/FSP/A.1-VIII/XI/1444 H/2022 M tanggal 17 Nopember 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MUNTASHIR M

No. Stambuk : 10564 1100617

Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Kinerja Pendamping Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Taulo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 November 2022 s/d 21 Januari 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu Jhaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP,
NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : **12297/S.01/PTSP/2022** Kepada Yth.
 Lampiran : - Bupati Enrekang
 Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3265/05/C.4-VIII/XI/1444/2022 tanggal 17 November 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **MUNTASHIR M**
 Nomor Pokok : **105641100617**
 Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
 Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
 Alamat : **Jl. Sit Alauddin No. 259, Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" KINERJA PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA
 TAULO KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **21 November 2022 s/d 21 Desember 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 21 November 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
 Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
 2. *Pertinggal.*


PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 73.16/019/DPMPTSP/ENR/IP/1/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

MUNTASHIR M

Nomor Induk Mahasiswa	: 105641100617
Program Studi	: ILMU PEMERINTAHAN
Lembaga	: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Pekerjaan Peneliti	: MAHASISWA
Alamat Peneliti	: BELAJEN BARAT
Lokasi Penelitian	: DESA TAULO KEC. ALLA KAB. ENREKANG
Anggota/Pengikut	: -

Maksud dan tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :

KINERJA PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA TAULO KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG

Lamanya Penelitian : **2023-01-10 s/d 2023-02-17**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaatl semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
10/01/2023 12:39:42
KEPALA DINAS,



Dr. H. HAJAR BULAY M
Panglot Pembina Tk.1
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat peneliti
4. Mahasiswa ybs.

 Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah diwujudkan secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN ALLA
DESA TAULO

Alamat: Jl. Poros Taulo, Malele No. 04, Telp. 0852 56263 897

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 000/00/DT/1/2023

Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini:

Nama	: HERMAN, SE
Jabatan	: Kepala Desa
Menerangkan Dengan Sebenarnya	
Nama	: MUNTASHIR M
Tempat/Tgl Lahir	: Belajen, 6-05-1994
NIM	: 105641109617
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Fakultas	: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Lembaga	: Universitas Muhammadiyah Makassar

Benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Desa Taulo, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, mulai pada tanggal 12-1/2023 s.d 13-1-2023 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " **KINERJA PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA TAULO KECAMATAN ALLA KABUPATEN ENREKANG** "

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Taulo, 14 Februari 2023
Mengetahui
Kepala Desa Taulo



Muntashir M 105641100617

BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 24-Jun-2023 12:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 2121746187

File name: PLAGIASI_SKRIPSI_BAB_1.doc (62.5K)

Word count: 599

Character count: 4073

Muntashir M 105641100617 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX
10% INTERNET SOURCES
2% PUBLICATIONS
4% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.umm.ac.id Internet Source	3%
2	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	3%
3	zombiedoc.com Internet Source	2%
4	docplayer.info Internet Source	2%

Exclude quotes Exclude bibliography Exclude matches 

Muntashir M 105641100617

BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 23-Jun-2023 07:35AM (UTC+0700)

Submission ID: 2121122468

File name: PLAGIASI_SKRIPSI_BAB_II_1.docx (55.02K)

Word count: 2894

Character count: 19808

Muntashir M 105641100617 BAB II

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

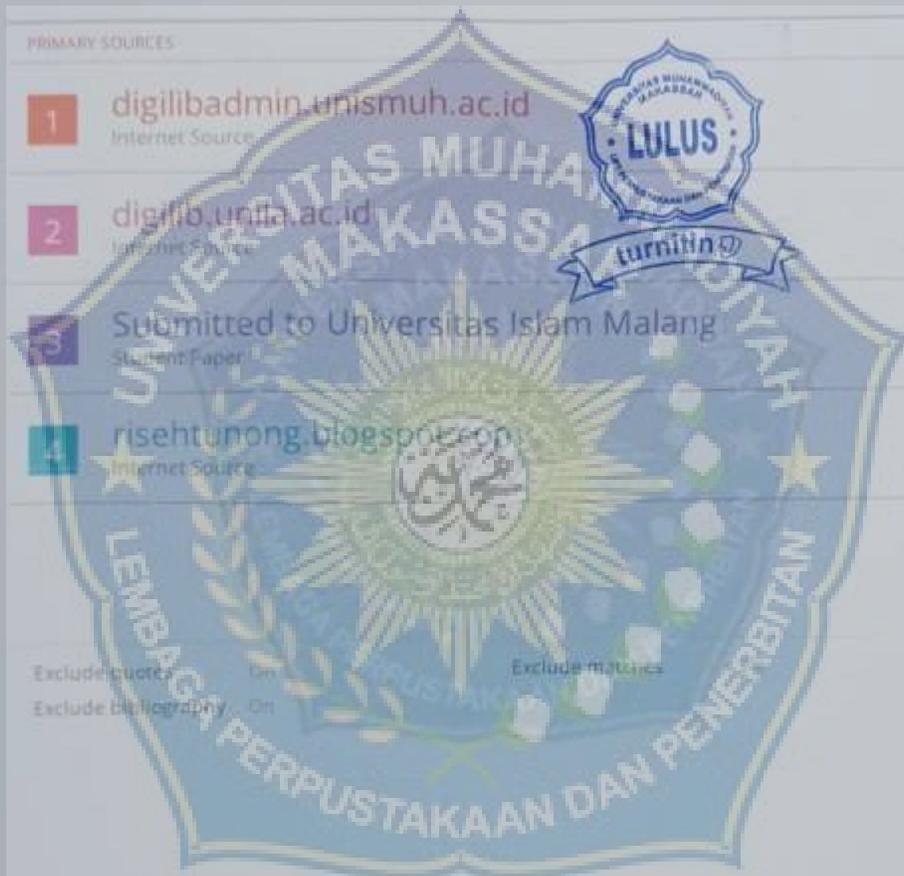
PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	8%
2	digilib.unifa.ac.id Internet Source	8%
3	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	6%
4	risehtunong.blogspot.com Internet Source	3%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches



Muntashir M 105641100617

BAB III

by Tahap Tutup



Submission date: 22 Jun 2022 12:10PM (UTC+07:00)

Submission ID: 212176622

File name: PLAGIASI_SKRIPSI_BAB_III.doc (46.5K)

Word count: 571

Character count: 3095

• Muntashir M 105641100617 BAB III

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX	10% INTERNET SOURCES	3% PUBLICATIONS	4% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	3%
2	id.123dok.com Internet Source	2%
3	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
4	journal.unj.ac.id Internet Source	2%
5	lisnamegaresky.blogspot.com Internet Source	2%

Exclude quotes Exclude bibliography Exclude matches



Muntashir M 105641100617

BAB IV

by Tahap Tutup



Submission date: 23-jun-2023 07:36AM (UTC+0700)

Submission ID: 2121122874

File name: PLAGISI_SKRIPSI_BAB_IV_1.docx (518.74K)

Word count: 4075

Character count: 27293

Muntashir M 105641100617 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

dpmptsp.sulselprov.go.id
Internet Source

3%

2

diglibadmi.n.unismuh.ac.id
Internet Source

2%

3

eprints.umpo.ac.id
Internet Source

2%

Exclude quotes

or

Exclude matches

Exclude bibliography



Muntashir M 105641100617

BAB V

by Tahap Tutup



Submission date: 22-Jun-2023 10:40AM (UTC+0700)

Submission ID: 2120672760

File name: PLAGIASI_SKRIPSI_BAB_V.docx (17.78K)

Word count: 214

Character count: 1490

Muntashir M 105641100617 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsu.ac.id	5%
	Internet Source	

Exclude quotes Exclude bibliography Exclude matches





MUNTASHIR. M, Dilahirkan di Kabupaten Enrekang tepatnya di Belajen Kecamatan Alla Pada Tanggal 16 Mei 1994. Anak ketiga dari lima bersaudara pasangan dari MUSTAMING dan HASNI UPA S.Pd. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar SDN 112 Belajen Kabupaten Erekang Kecamatan Alla pada tahun pada tahun 2004. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di MTs N 1 Alla kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah Kalosi tahun 2010 dan seslesai pada tahun 2013. Setelah lama menganggur peneliti melanjutkan S1 Ilmu pemerintahan Fakultas Sosial Dan Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2017. Terimah kasih

